

DAFTAR RUJUKAN

- _____, "Sejarah MUI" dalam <https://mui.or.id/sejarah-mui/> diakses tanggal 16 Oktober 2018
- Adams, Wahiduddin. 2012. *Fatwa MUI: dalam Prespektif Hukum dan Perundang-undangan*. Jakarta: Puslitbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Aflah, Noor. 2009. *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Al-atok, Rosyid, 2015. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Teori, Sejarah, dan Perbandingan dengan Negara Bikameral)*. Malang: Setara Press
- Al-Fanani, Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari. 2015. *Fathul Mu'in Jilid II*. terj. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Ali, Muhammad Daud. 2009. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Al-Mallah, Husain Muhammad. 2001. *Al-Fatwa nasy'atuha wa tatawwuruha-usuluha wa tatbitatuha*. Beirut: Maktabag al-'Asyriyah
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1993. *Hukum Zakat*. Terj. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa
- _____. 2002. *Fiqh Prioritas: Sebuah Kajian Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah*, terj. Bahruddin F. Jakarta: Rabbani Press
- _____. 2008. *Legalitas Politik (Dinamika Prespektif Nash dan Asy-Syari'ah)*. Bandung: Pustaka Setia
- Asmawi. *Zakat dan Produktifitas Masyarakat*. Jurnal Ahkam 2 (2)
- Asriaty. 2012. *Penerapan Syariah dalam Undang-undang Negara*. Jurnal Ahkam 14 (02). Tulungagung: Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) STAIN Tulungagung
- Aziz Syamsuddin, 2013. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-undang edisi II*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bahruddin, M. Tt. *Ijma' dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*,(tk: Jurnal tidak diterbitkan

Barlinti, Yeni Salma. 2012. *Fatwa MUI tentang Ekonomi Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Basiq Djalil. 2012. *Peradilan Islam*. (Jakarta: Amzah)

Bisri, Ilhami. 2014. *Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Departemen Agama RI. 1985. Al-Quran dan terjemahnya. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. dalam <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/AlatKelengkapan-Komisi>, diakses tanggal 31 Oktober 2018

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “Badan Legislasi” dalam <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Legislasi>, diakses tanggal 31 Oktober 2018

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang. 2011. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. ttt:tp

Fatwa MUI No 13 tahun 2011 tentang Hukum Zakat atas yang Haram.

_____ No 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

_____ No 8 tahun 2011 tentang Fatwa asnaf-asnaf zakat meliputi: Fatwa tentang amil zakat.

_____ tentang masalah zakat kontemporer meliputi defenisi, tugas, dan fungsi, kewajiban, dan hak-hak amil, zakat perusahaan, dan sebagainya.

_____ 14 tahun 2011 tentang Fatwa penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat.

_____ 15 tahun 2011 tentang Fatwa Penyaluran Harta Zakat Bentuk Asset Kelolaan.

_____ 4 tahun 2003 tentang Fatwa Penggunaan Zakat untuk Istismar/investasi.

_____ Kep-120/MUI/II/1996 tentang Fatwa tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa.

_____ tahun 1982 tentang Fatwa Mentasharruf Dana Zakat untuk Kegiatan Prodktif dan Kemaslahatan Umum

- _____ tahun 1982 tentang Fatwa pengelolaan zakat: Fatwa tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat
- Keputusan Komisi B1 Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III tentang Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah Masalah Fikih Kontemporer.
- Fidmatan, Kardi. 2016. *Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan*. (Skripsi). Makassar: UIN Alaudin Makasaar
- Fuad, Mahsun. 2005. *Hukum Islam Indonesia (Dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris)*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara
- Hafiz. PBNU: Tidak Ada Lembaga Fatwa Otoritatif di Indonesia, dalam <http://www.nu.or.id/post/read/1031197/pbnu-tidak-ada-lembaga-otoritatif-di-Indonesia>, diakses tanggal 1 April 2019
- Hakim, Budi Rahmat. *Analisis terhadap Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Prespektif Hukum Islam)*. Jurnal Hukum 15 (2)
- Hasanah, Uswatun. 2008. *Napak Tilas Undang-undang Wakaf (bagian I)*, dalam <https://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/314-napak-tilas-undang-undang-wakaf-bagian-1.html>, diakses tanggal 9 januari 2019
- Huda, Miftahul. 2012. *Sumbangsih Fatwa MUI tentang Wakaf Uang terhadap Sisi Kebijakan dan Kualitas Produk Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Hutabarat, Delvira Chaerani. "Sidang Ahok, Ketua MUI Sebut Keluarkan Fatwa Karena Desakan" dalam <https://google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/2842030/sidang-ahok-ketua-mui-sebut-keluarkan-fatwa-karena-desakan> diakses tanggal 12 Oktober 2018
- Imran, Muhammad. 2015. *Sistem Syuro' dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam (Syuro' System ' In The Organization Of The Islamic)*. Jurnal IUS 3 (7)
- Kadariusman. 2012. *Artikulasi Politik Islam di Indonesia: Kajian atas Fatwa MUI Pascareformasi*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Karni, Asrori S. 2010. *Problem Konseptual Otoritas Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Dalam Regulasi Perbankan Syariah*. (Disertasi) Jakarta: Universitas Indonesia

- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2005. *Proses Lahirnya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji
- Mahfud MD, Muhammad. 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mahfudin, Agus. 2015. *Majelis Ulama Indonesia Dan Metode Fatwa*. Jurnal Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang 6 (1)
- Maksum, Muhammad. 2012. *Peran Fatwa DSN dalam Menjawab Perkembangan Produk Keuangan Syariah*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Mudzar, M. Atho. Tt. *Fatwa MUI sebagai Obyek Kajian Hukum Islam dan Sumber Sejarah Sosial*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Mustofa, dan Abdul Wahid. 2013. *Hukum Islam Temporer*. Jakarta: Sinar Grafika
- Nopiardo, Widi. 2017. *Perkembangan Fatwa MUI tentang Masalah Zakat*, Jurnal Ilmiah Syari’ah 16 (I)
- Nurmawati, Made, I Gde Marhaendra Wija Atmaja. 2017. *Pengembangan Mata Kuliah Hukum Perundang – undangan (Jenis, fungsi dan materi muatan Peraturan perundang-undangan)*. Bali: Universitas Udayana
- Peraturan Oganisasi Majelis Ulama Indonesia. *Pedoman Penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia
- Prakoso, Amriyono. “Mahfud MD Jelaskan Fatwa MUI tidak Perlu Diikuti Karena bersifat Otonom” dalam <http://m.tribunnews.com/nasional/2017/01/17/mahfud-md-jelaskan-fatwa-mui-tidak-perlu-diikuti-karena-bersifat-otonom> diakses tanggal 24 Pebruari 2019
- Riadi, M. Erfan. 2010. *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum positif (analisis yuridis normatif)*. Jurnal Ulumuddin 6 (4)
- Saepullah, Asep. 2012. “Perbedaan UU Zakat yang Lama dengan yang Baru”, dalam <https://shareeducation.wordpress.com/2012/10/25/perbedaan-uu-zakat-yang-lama-dengan-yang-baru/>, diakses tanggal 9 Januari 2018
- Siregar, Mudzakir Khotib. 2016. *Legislasi dan Kodifikasi Hukum Islam*. Jurnal el-Qonuny. 2 (1)
- Suduhukum.com. 2016. “Sejarah Terbentuknya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”, diakses dari

<https://www.suduthukum.com/2016/10/sejarah-terbentuknya-undang-undang-no.html> diakses tanggal 4 Januari 2019

Tim Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia VI. 2018. *Rancangan Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI Tahun 2018 tentang Masail Qanuniah (Masalah Peraturan Perundang-undangan)*. Kalimantan Selatan: tidak diterbitkan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*. Jakarta : Media Pressindo

Wulan, R. Teja. MUI “Keluarkan Fatwa haram Golput, Partisipasi Pemilih Meningkatkan”, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/mui-keluarkan-fatwa-haram-golput-partisipasi-pemilih-meningkat/18766337.html>, diakses tanggal 24 Januari 2019

Yuliandri. 2013. *Asas-asas Pembentukan peraturan Perundang-undangan yang Baik*. Jakarta: Grafindo

LAMPIRAN-LAMPIRAN